

**AKUNTABILITAS PENYERAPAN ANGGARAN BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Strata-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**PUTRI OKTARIANI  
07011381722166**

**Konsentrasi Administrasi Keuangan Negara dan Fiskal**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
JULI 2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS PENYERAPAN ANGGARAN BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam  
Menempuh Derajat Strata-1 Ilmu Administrasi Publik**


**Oleh:**

**PUTRI OKTARIANI  
07011381722166**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 2021**

**Pembimbing I**

**Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si  
NIP. 197705122003121003**



Handwritten signature of Sofyan Effendi with the date 22/6, written above a horizontal line.

**Pembimbing II**

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA  
NIP. 198108272009121002**



Handwritten signature of Zailani Surya Marpaung, written above a horizontal line.

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**AKUNTABILITAS PENYERAPAN ANGGARAN BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada tanggal 14 Juli 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

Sofvan Effendi, S.IP., M.Si  
Ketua



Zailani Surya Marpuang, S.Sos., MPA  
Anggota



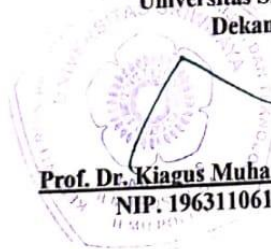
Dr. Nurmah Semil, M.Si  
Anggota



Drs. Mardianto, M.Si  
Anggota



Palembang, Juli 2021  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya  
Dekan,



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Ketahuilah, bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan dan kesulitan bersama kemudahan”*

*(HR. Tirmidzi)*

*Dipersembahkan untuk:*

- 1. Kedua Orangtuaku Ayah A.Rivai dan Ibu Sumiati*
- 2. Kakakku M. Adityawarman Aji Utama, S.M*
- 3. Almamater Kebanggaanku*

## ABSTRAK

Sistem pemerintahan di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut yang menjadi tuntutan untuk adanya akuntabilitas yang baik dalam system pemerintahan. Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan akuntabilitas dalam hal pengelolaan anggarannya. Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah setelah melaksanakan kegiatan rutin dalam satu tahun anggaran. Akan tetapi tingkat akuntabilitas di Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir masih menjadi tantangan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk lima tahun kedepan yaitu tahun 2019-2024. Jika dilihat melalui Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024, masih adanya tantangan mengenai tuntutan akuntabilitas serta masih rendahnya proporsi belanja langsung terhadap daerah. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui tingkat akuntabilitas penyerapan anggaran menggunakan jenis-jenis akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dengan tiga dimensi yaitu Akuntabilitas keuangan, Akuntabilitas manfaat dan Akuntabilitas prosedural. Jenis penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan keyinforman, observasi langsung ke lapangan dan dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tingkat Akuntabilitas keuangan, Akuntabilitas manfaat, dan Akuntabilitas prosedural di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 telah dijalankan secara Akuntabel. Pembuktiannya dengan adanya penghargaan yang diberikan Pemerintahan Republik Indonesia kepada Kabupaten Ogan Komering Ilir atas pencapaian opini WTP dari tahun 2015-2019.

**Kata Kunci : Akuntabilitas, Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Pembimbing I



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

Pembimbing II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA


NIP. 198108272009121002

Palembang, Juli 2021

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002



## **ABSTRACT**

*The current system of government in Indonesia has developed into a central government and local government. This is a demand for good accountability in the government system. At the Regional Development Planning Agency of Ogan Komering Ilir Regency as one of the Regional Apparatus Organizations that implements accountability in terms of budget management. Accountability in budget management is the responsibility carried out by the government after carrying out routine activities in one fiscal year. However, the level of accountability in the Regional Development Planning Agency of Ogan Komering Ilir Regency is still a challenge for the Regional Development Planning Agency of Ogan Komering Ilir Regency for the next five years, namely 2019-2024. When viewed through the Strategic Plan of the Regional Development Planning Agency of Ogan Komering Ilir Regency in 2019-2024, there are still challenges regarding accountability demands and the low proportion of direct spending to the regions. The purpose of this study was to determine the level of accountability for budget absorption using the types of accountability according to the State Administration Agency and the Financial and Development Supervisory Agency with three dimensions, namely financial accountability, benefit accountability and procedural accountability. This type of qualitative research uses data collection techniques by interviewing key informants, direct field observations and 2019 Accountability Report (LPJ) documents. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the levels of financial accountability, benefit accountability, and procedural accountability at the Regional Development Planning Agency Ogan Komering Ilir Regency in 2019 has been carried out optimally. The proof is in the award given by the Government of the Republic of Indonesia to Ogan Komering Ilir Regency for the achievement of the WTP opinion from 2015-2019.*

**Keywords:** *Accountability, Regional Development Planning Agency, Ogan Komering Ilir Regency*

Advisor I



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

Advisor II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA


NIP. 198108272009121002

Palembang, July 2021

Chairman of The Public Administration Departement

Faculty of Social and Political Science

Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur alhamdulillah, kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan jasmani dan rohani yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dengan kehendak-Nya juaah penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini. Usulan Penelitian ini berjudul **Akuntabilitas Penyerapan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019.**

Usulan Penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Dengan Segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang tua, A. Rivai dan Sumiati yang selalu memberikan doa, restu, semangat selama menyelesaikan kuliah hingga skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan waktu untuk membimbing, memberikan saran dan masukan yang sangat membantu menyelesaikan Usulan Penelitian ini.
5. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu untuk membimbing, memberikan saran dan masukan yang sangat membantu menyelesaikan Usulan Penelitian ini.

6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh Staf jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Makruf CM, S.IP, MM selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, atas waktu yang diberikan selama penulis melakukan penelitian.
8. Bapak Muhammad Rais, SE selaku Kepala Sub bagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, atas waktu yang diberikan selama penulis melakukan penelitian.
9. Bapak Dikko Alrahman, S.I.A., ME selaku Kepala Sub bagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, atas waktu yang diberikan selama penulis melakukan penelitian.
10. Bapak Endro Suarno, selaku Ketua Tim Audit Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir, atas waktu yang diberikan selama penulis melakukan penelitian.
11. Kakakku M. Adityawarman Aji Sutarna, S.M, terimakasih atas dukungan dan semangatnya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Partai Micin Sejahtera, Adelia, Charyna, Edwin, Fia, Fenny, Firda, Mella, Monic, Poppy, Syafira, dan Sely, selalu memberikan semangat, doa, serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik Angkatan 2017, terkhususnya Kelas B Kampus Palembang, selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsinya.

Palembang, Juli 2021

Putri Oktariani  
NIM. 07011381722166



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II.....</b>	<b>11</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Definisi Keuangan Negara.....	11
B. Konsep Akuntabilitas.....	12
1. Pengertian Akuntabilitas .....	12
2. Jenis-jenis Akuntabilitas .....	14
3. Indikator-indikator Akuntabilitas.....	15
C. Definisi Anggaran Sektor Publik .....	15

D. Konsep Penyerapan Anggaran .....	17
1. Pengertian Penyerapan Anggaran .....	17
2. Faktor Mempengaruhi Penyerapan Anggaran .....	18
E. Teori Akuntabilitas Yang Digunakan .....	18
F. Penelitian Terdahulu .....	20
G. Kerangka Pemikiran .....	22
<b>BAB III .....</b>	<b>25</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Desain Penelitian .....	25
B. Definisi Konsep.....	25
C. Fokus Penelitian .....	26
D. Jenis dan Sumber Data.....	27
E. Informan Penelitian .....	28
F. Teknik Pengumpulan Data .....	28
G. Teknik Analisis Data .....	29
H. Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB IV.....</b>	<b>32</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum.....	32
1. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	32
2. Arti Lambang Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	34
3. Visi Misi Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	35
B. Gambaran Umum BAPPEDA Kabupaten OKI.....	37
1. Sejarah Singkat .....	37
2. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten OKI .....	38
C. Pembahasan .....	44
1. Akuntabilitas Keuangan.....	45
a. Integritas Yang Baik dan Jujur .....	45
b. Pengungkapan Secara Jelas .....	48

c. Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan.....	53
2. Akuntabilitas Manfaat .....	55
a. Perhatian Kepada Hasil dari Kegiatan-kegiatan Pemerintah.....	55
b. Melihat Dampak dari Kegiatan-kegiatan Pemerintah.....	57
3. Akuntabilitas Prosedural.....	59
a. Pelaksanaan Suatu Kebijakan dengan Mempertimbangan Moralitas, Etika, Kepastian Hukum dan Ketaatan pada Putusan Politis .....	59
b. Pelaporan dari Kebijakan dengan Mempertimbangkan Moralitas, Etika, Kepastian Hukum dan Ketaatan pada Putusan Politis .....	61
<b>BAB V .....</b>	<b>65</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Serapan Anggaran Dalam Lingkup Badan di Kabupaten Ogan Komerling Ilir Tahun 2019 .....	4
Tabel 1.2	Alokasi dan Realisasi Program/kegiatan Tahun Anggaran 2019 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ilir .....	5
Tabel 1.3	Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 1.4	Fokus Penelitian.....	26

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Pemikiran.....	23
Gambar 1.2	Peta Kabupaten OKI.....	32
Gambar 1.3	Lambang Kabupaten OKI .....	34
Gambar 1.4	Kantor BAPPEDA Kabupaten OKI .....	37
Gambar 1.5	Susunan Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten OKI .....	38
Gambar 1.6	Bukti Pernyataan Tanggung Jawab BAPPEDA Kabupaten OKI .....	47
Gambar 1.7	Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	51
Gambar 1.8	Sertifikat Penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Untuk Pencapaian WTP Tahun 2019 Kabupaten OKI .....	53
Gambar 1.9	Plakat dari Pemerintah Republik Indonesia Untuk Pencapaian Opini WTP Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2019.....	53
Gambar 2.1	Bukti Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran oleh BAPPEDA Kabupaten OKI .....	55
Gambar 2.2	Kegiatan Musrenbang Kecamatan Tahun 2019 Yang Dilakukan Oleh BAPPEDA Kabupaten OKI.....	58
Gambar 2.3	Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten OKI Tahun 2020.....	59
Gambar 2.4	Kerangka Pendanaan RPJMD Kabupaten OKI Tahun 2019-2024 .....	60
Gambar 2.5	Fingerprint Di BAPPEDA Kabupaten OKI .....	63

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Pembimbing Skripsi
2. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
3. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I
4. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II
5. Lembar Revisi Seminar Proposal
6. Surat Permohonan Izin Penelitian
7. Surat Balasan Penelitian
8. Pedoman Wawancara
9. Undang-Undang Dasar Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 16 Tentang Membandingkan Realisasi Kinerja Dengan Sasaran (Target) Kinerja Yang Mencantumkan Dalam Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja Dalam Rangka Pelaksanaan APBN/APBD Tahun Berjalan.



# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem pemerintahan di Indonesia telah mengalami perkembangan menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut yang menjadi tuntutan adanya suatu sistem keuangan negara yang dapat menjamin kelancaran pemerintahan dan pembangunan serta penyediaan jasa-jasa publik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerapan *good governance* dapat menjadi pendorong pendekatan yang lebih sistematis dalam pengelolaan anggaran, baik bagi pemerintah pusat maupun bagi pemerintah daerah. Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah mengemukakan ada sembilan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu: Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Responsif, Orientasi Kesepakatan, Keadilan, Efektivitas dan Efisiensi, Visi Strategis, dan Akuntabilitas.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa, Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan/penyerapan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Perwujudan dari penerapan *good governance* dalam pengelolaan anggaran terutama pada tahapan akuntabilitas harus di optimalkan, karena prinsip akuntabilitas merupakan perwujudan dari pemerintah sebagai pengelola anggaran serta sebagai penyedia informasi kepada publik mengenai tindakan atau kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran, selain itu akuntabilitas yang optimal menjadi tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan agar terciptanya pemerintahan yang baik.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 16 menyebutkan bahwa, Membandingkan Realisasi Kinerja Dengan Sasaran (Target) Kinerja Yang Mencantumkan Dalam Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja Dalam Rangka Pelaksanaan APBN/APBD Tahun Berjalan. Melihat dari Peraturan Presiden tersebut, prinsip akuntabilitas di sektor publik harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai pelaksana dan pengelola anggaran, agar input dan output anggaran yang tersedia dapat dikelola dengan baik yang sesuai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Prinsip akuntabilitas dalam sektor publik terutama dalam pengelolaan anggaran juga dapat menjadi pengetahuan masyarakat mengenai apa saja kegiatan/program yang dilakukan oleh pemerintah mengenai anggaran yang tersedia dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang selanjutnya akan dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan publik.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melaksanakan akuntabilitas di sektor publik, perlu memperhatikan prinsip-prinsip dari akuntabilitas, yaitu: (1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, (2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, (5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang dikutip oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menjelaskan bahwa akuntabilitas memiliki beberapa jenis, yaitu: (1) Akuntabilitas Keuangan, akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan, (2)

Akuntabilitas Manfaat, akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintah, (3) Akuntabilitas Prosedural, akuntabilitas prosedural dari pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan

Pemerintah daerah selaku yang menjalankan pemerintahan di daerah khususnya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk dapat mengatur sendiri rumah tangga dengan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia di daerahnya. Pemerintah juga dituntut memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam mempertanggung jawabkan tingkat akuntabilitas yang optimal, karena semakin optimalnya akuntabilitas pada pengelolaan anggaran, maka semakin berhasil pula pemerintah dalam melaksanakan visi suatu organisasi. Pada pelaksanaan pengelolaan anggaran, permasalahan mengenai penyerapan anggaran menjadi masalah yang klasik terjadi setiap tahunnya dan dapat membawa dampak terhadap program atau kegiatan pemerintah. Biasanya, tingkat keberhasilan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) digambarkan dalam persentase serapan anggaran. Penyerapan anggaran dalam lingkup pemerintah daerah berarti kegiatan atas pelaksanaan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (UU APBD) yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, tingkat dari penyerapan anggaran yang di capai tidak selalu dilihat dari adanya persoalan pada akuntabilitas anggaran.

Hal tersebut dikarenakan, akuntabilitas anggaran hanya melihat seberapa tinggi pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran oleh pelaksana anggaran.

Berikut merupakan tabel mengenai Serapan Anggaran dalam lingkup Badan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019:

**Tabel 1.1**  
**Serapan Anggaran Dalam Lingkup Badan di Kabupaten**  
**Ogan Komering Ilir Tahun 2019**

No	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	(%)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 5.327.540.000	Rp. 5.230.046.018	Rp. 97.493.982	98,94
2	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah	Rp. 15.063.462.000	Rp. 14.837.662.378	Rp. 225.799.622	98,74
3	Badan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 6.152.000.000	Rp. 5.9952.060.000	Rp. 199.940.000	96,75
4	Badan Penelitian dan Pengembangan	Rp. 1.600.000.000	Rp. 1.565.000.000	Rp. 35.000.000	97,84
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 11.057.643.000	Rp. 3.280.802.678	Rp. 7.776.840.322	29,67
6	Badan Layanan Umum	Rp. 53.964.511.828	Rp. 51.563.091.052	Rp. 2.401.420.776	95,55
7	Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan	Rp. 7.981.857.000	Rp. 6.241.013.988	Rp. 1.740.843.012	78,19
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 3.232.700.000	Rp. 3.210.394.370	Rp. 22.305.630	99,31
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 104.379.713.828</b>	<b>Rp. 91.880.070.494</b>	<b>Rp. 12.499.643.344</b>	<b>86,25</b>

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab OKI, diolah penulis 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Badan di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019 memiliki tingkat penyerapan anggaran yang baik, walaupun masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tingkat serapan anggarannya masih rendah. Pada tabel 1.1 diatas, serapan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 sebesar 98,94%. Berikut rincian mengenai serapan anggaran Tahun 2019 sebesar 98,94%:

**Tabel 1.2**  
**Alokasi dan Realisasi Program/kegiatan Tahun Anggaran 2019 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<i>I</i>	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>			
1	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	92.445.000	74.662.392	80,76
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	15.000.000	7.451.475	49,68
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	61.440.000	61.440.000	100,00
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	16.500.000	16.500.000	100,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.500.000	35.500.000	100,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	30.000.000	100,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000	11.000.000	100,00

8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Paraturan Perundang-Undangan	64.900.000	64.873.500	99,96
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	20.000.000	100,00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	32.500.000	32.500.000	100,00
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	225.000.000	224.644.069	99,84
12	Rapat-Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah	83.500.000	83.100.000	99,52
13	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Pelayanan Kegiatan	400.800.000	372.300.000	92,89
<b>II</b>	<b><i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i></b>			
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	117.865.000	117.865.000	100,00
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	147.000.000	146.700.000	99,80
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	144.800.000	144.768.000	99,98
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	236.040.000	235.606.125	99,82
<b>III</b>	<b><i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i></b>			
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	21.600.000	21.500.000	99,54
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	29.150.000	29.120.000	99,90



<b>IV</b>	<b><i>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</i></b>			
1	Pendidikan dan Pelatihan Forma	10.000.000	0	
<b>V</b>	<b><i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i></b>			
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	10.000.000	10.000.000	100,00
2	Penyusunan RENSTRA, RENJA, IKU, TAPKIN, LKJIP, LPPD, dan LKPJ OPD	100.000.000	100.000.000	100,00
<b>VI</b>	<b><i>Program Pengembangan Data/Informasi</i></b>			
1	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi/Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	60.000.000	59.600.000	99,33
2	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	60.000.000	60.000.000	100,00
<b>VII</b>	<b><i>Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</i></b>			
1	Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana	171.665.000	171.645.710	99,99
<b>VIII</b>	<b><i>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</i></b>			
1	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	215.000.000	212.500.000	98,84

2	Penyelenggaraan Musrenbang	325.000.000	323.331.793	99,49
3	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten OKI	140.000.000	140.000.000	100,00
4	Pelaksanaan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), dan Panitia Kemitraan (PAKEM) Program PAMSIMAS	90.000.000	90.000.000	100,00
5	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten OKI	83.000.000	83.000.000	100,00
6	Evaluasi RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten OKI	18.335.000	18.335.000	100,00
7	Penyusunan Pagu Indikatif Program/kegiatan Kabupaten OKI	80.000.000	78.800.000	98,50
8	Penyusunan Pagu Indikatif Program/kegiatan Kabupaten OKI	127.500.000	125.700.000	98,59
9	Pokja PKP (Perumahan dan Pemukiman) Kabupaten OKI	90.000.000	90.000.000	100,00
10	Pengembangan SIMDA Perencanaan	230.00.000	229.985.096	99,99
11	Penyusunan Rencana Program Kegiatan Sektoral	90.000.000	89.647.648	99,61
12	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	150.000.000	142.800.000	95,20
13	Penyusunan RPJM Daerah Kabupaten OKI	215.000.000	213.100.000	99,12
14	Asistensi Penyusunan Renstra SKPD	240.000.000	236.348.000	98,48

<b>IX</b>	<b><i>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</i></b>			
1	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	240.000.000	235.707.233	98,21
2	Analisis Perekonomian Daerah	170.000.000	167.722.170	98,66
<b>X</b>	<b><i>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</i></b>			
1	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	362.000.000	358.039.261	98,91
2	Penyusunan Analisis Indikator Kesejahteraan Sosial (Inkesos) Kabupaten OKI	65.000.000	65.000.000	100,00
3	Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan	100.000.000	100.000.000	100,00
4	Pelaksanaan Percepatan SDG's (Sustainable Development Goals)	100.000.000	99.419.402	99,42

Sumber : Bappeda Kab.OKI, 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa hampir semua kegiatan/program yang di jalankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 terealisasi dengan baik dan mencapai tingkatan persen yang efektif, walaupun pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional masih rendah yaitu hanya 49,68%.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Apakah tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah hanya dilihat dari tinggi atau rendahnya tingkat penyerapan anggaran? Serapan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun

2019 sudah efektif dan dapat dikatakan baik yang mencapai 98,94%, tapi mengapa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir masih adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan masih rendahnya proporsi belanja langsung terhadap belanja daerah? Mengapa masih terjadi fenomena terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kinerja keuangan yang masih rendah?

Untuk menjawab semua pertanyaan dan pemaparan diatas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan akan di bahas melalui skripsi ini dengan judul **Akuntabilitas Penyerapan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian maka dirumuskan masalah, Bagaimana Akuntabilitas Penyerapan Anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk melihat seberapa akuntabel anggaran mengenai Akuntabilitas Penyerapan Anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan masukan bagi kajian Ilmu Administrasi Publik, terutama dalam bidang Keuangan Negara, khususnya mengenai Akuntabilitas Penyerapan Anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 dengan menggunakan teori jenis-jenis akuntabilitas.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan rekomendasi bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Keban, Yeremias T. 2014, *Enam Dimensi Administrasi Publik*, Yogyakarta: Penerbit: Gava Media
- Mahmudi. 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPPAMPYKPN
- Mardiasmo. 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit: Andi Offset
- Sugiyono, Prof. Dr. 2017, *Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan RAD*, Bandung: Penerbit Alfabeta

### Penelitian

- Amaral, Joao., Luh Putu Wiagustini. 2019. Efektivitas Penyerapan Anggaran Pada Ministerio Dan Obras Publicas Timor Leste. FEB Universitas Udayana : Bali. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Review 8(2),95-136. (diakses tanggal 25 September 2020.pukul19.30WIB).<https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/46524>
- Agustiani. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Tahun 2014-2015 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone : Bone. Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Review 2(1). (diakses tanggal 18 Maret 2021.pukul20.30WIB).<https://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/altsarwah/article/view/280>
- Fajar, Nurul., Muhammad Arfan. 2017. Analisis Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. FEB Universitas Syiah Kuala : Banda Aceh. Journal of Accounting Research Review 10(2),95-102.(diakses tanggal 23 September 2020.pukul18.41WIB).<https://jurnal.unsyiah.ac.id/tra>
- Gohara, Joni., Florence D.J. Lengkong., Novva N. Plangiten. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Halmahera Utara Review 4(49). (diakses 20 Maret 2021.pukul19.09WIB). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/18444>
- Hamdan, Nurfaizy, Muhammad., Fatahillah Ruslan., dkk. 2020. Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Pada Instansi Pemerintah Berdasarkan Prinsip Islam. Akuntansi Universitas Islam Negeri Alauddin : Makassar. E-Journal Islamic Accounting and Finance Review 1(2). (diakses pada tanggal 17 Maret 2021.pukul11.52WIB).<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/article/view/18280>
- Iqbal, Muhammad. 2018. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai



Pemoderasi. FEB Universitas Hasanuddin : Makassar. Tesis. (diakses pada tanggal 17 Januari 2021, pukul 13.32 WIB). [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwimyjltLvAhX7\\_XMBHTrGDcsQFjAAegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fdigilib.unhas.ac.id%2Fuploaded\\_files%2Ftemporary%2FDigitalCollection%2FZjMwOGQ3ZDc5MWRhOWU4MTI4YWEyY2RiNDg4N2YzNTA0YzUzM2Q3NQ%3D%3D.pdf&usg=AOvVaw1HUqil37xfT4jkemfL7Dpw](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwimyjltLvAhX7_XMBHTrGDcsQFjAAegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fdigilib.unhas.ac.id%2Fuploaded_files%2Ftemporary%2FDigitalCollection%2FZjMwOGQ3ZDc5MWRhOWU4MTI4YWEyY2RiNDg4N2YzNTA0YzUzM2Q3NQ%3D%3D.pdf&usg=AOvVaw1HUqil37xfT4jkemfL7Dpw)

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah menyatakan bahwa Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan menyatakan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan/penyerapan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Semua Pengeluaran dari Rekening Kas Umum atau Daerah yang Mengurangi Ekuitas Dana Lancar Dalam Periode Tahun Anggaran Bersangkutan yang Tidak Akan Diperoleh Pembayarannya Kembali oleh Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 16 menyebutkan bahwa Membandingkan Realisasi kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang Mencantumkan Dalam Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja Dalam Rangka Pelaksanaan APBN/APBD Tahun Berjalan.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.